



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 40/Pdt.P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

La Badu bin Latuo, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten soppeng, sebagai Pemohon I

Jumaini binti Lacolle, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Mei 2012 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 40/Pdt.P/2012/PA.Wsp, tanggal 1 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1962 Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon 1 dan pemohon II adalah Imam kampung Leworeng yang bernama Nahong.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lacolle.
4. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah La Nori dan La Ningke dengan mahar 11 ringgit.
5. Bahwa selama pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Badriani binti Badu, umur 37 tahun.
 2. Kasman bin Badu, umur 28 tahun.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon Pengesahan Isbat Nikah sebagai salah satu syarat kelengkapan pengurusan tunjangan Veteran.
7. Bahwa pada waktu pemohon 1 dan pemohon II menikah tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena belum tertib pencatatan nikah sesuai undang-undang yang berlaku.
8. Bahwa pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa pernikahan antara pemohon I (La Badu bin Latuo) dengan Jumaini binti Lacolle (pemohon II) yang terjadi pada tahun 1962 di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng adalah sah menurut hukum.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 03 Mei 2012 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah menghadap persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang memberi keterangan di depan majelis hakim di bawah sumpah masing-masing:

Saksi ke satuyang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1962, yang dikawinkan oleh Imam Nahong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Lacolle, dengan mahar 11 ringgit dan saksi nikahnya La Nori dan La Ningke.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa keduanya tidak pernah cerai hingga sekarang.
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain.

Saksi ke dua Yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1962, yang dikawinkan oleh Imam Nahong.
- Wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Lacolle, dengan mahar 11 ringgit dan saksi nikahnya La Nori dan La Ningke.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa keduanya tidak pernah cerai hingga sekarang.
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain.

Bahwa, untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala yang yang termuat dalam berita acara adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 03 Mei 2012 untuk diumumkan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya yang terjadi pada tahun 1962 di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dapat disahkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang pada pokoknya sejalan dan dapat mendukung dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1962 di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang dikawinkan oleh Imam Kampung Leworeng bernama Nahong, dengan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung pemohon II bernama Lacolle, saksi nikah La Nori dan La Ningke, dengan mahar 11 ringgit.

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon sangat memerlukan Surat Bukti Nikah untuk pengurusan tunjangan veteran.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 Thn. 1974, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah bahwa perkawinan yang dianggap sah menurut agama yang dianutnya adalah sah pula menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang rukun, syarat dan larangan nikah yang diatur dalam Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dikorelasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai surat bukti nikah karena pencatatan perkawinan ketika itu belum tertib.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai alasan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa demikian pula pemohon mempunyai kepentingan kongkrit yang mengharuskan adanya bukti sah tentang status perkawinannya yakni untuk pengurusan tunjangan veteran sebagai pejuang kemerdekaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Buku Bughyatul Musytarsyidin halaman 298 :

Artinya: “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan yang sesuai permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum-hukum syar’i yang bertalian dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I La Badu bin Latuo dengan Pemohon II Jumaini binti Lacolle, yang terjadi pada tahun 1962 di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal Rajab 1433 H, oleh Drs. H. Usman S, S.H., ketua majelis, serta Drs. Hanafi Lamuha dan Hj. St. Aisyah S, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Mastang, S.Ag., panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Drs. Hanafie Lamuha

Hj. St. Aisyah, S.H.

Ketua majlis,

Drs. H. Usman S, S.H.

Panitera pengganti,

Mastang, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 3. ATK | Rp 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00